

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT
PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI,
BUDAYA ORGANISASI, DAN DESENTRALISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah)**



Disusun oleh:

EKA BUDI SETYANINGTYAS

NIM. E2B014016

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2018

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI,
DAN DESENTRALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah)

Riwayat Artikel: dikirim Oktober 2018, diterima September 2018, diterbitkan September 2018

Eka Budi Setyaningtyas

(E2B014016)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Email: ekatyas98@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi sebagai variabel moderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai struktural Dinperindag yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 47 responden dari 291 pejabat struktural di Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Uji validitas data menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.574 > 1,690$) dan nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$). Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan budaya organisasi dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata kunci : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Desentralisasi.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan organisasi publik dewasa ini. Dalam konteks organisasi pemerintah, Mardiasmo (2009 : 20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, sebuah surat kabar menjelaskan bahwa “Akuntabilitas kementerian / lembaga dan pemerintah daerah masih rendah dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah kabupaten dan kota tahun 2016 menunjukkan banyak instansi belum berbenah untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat” (Abdur, 2017:2).

Hal tersebut dinyatakan oleh Asman Abdur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP). LHE AKIP regional satu yang terdiri dari 172 pemerintah kabupaten/kota tahun 2016 telah dievaluasi oleh PAN-RB menjelaskan bahwa sebanyak 81 pemerintah kabupaten/kota regional satu masih mendapat kategori C yang artinya cukup dan 69 pemerintah kabupaten/kota mendapat kategori C yang artinya kurang. Hal tersebut mencerminkan dari 172 pemerintah kabupaten/kota bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dominan masih rendah.

Adanya hal tersebut, maka perlu dievaluasi bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

yang menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan 4 asas, yaitu asas desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas-asas pelayanan publik meliputi : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari kinerja. Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan.

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Jadi, tujuan organisasi dan anggarannya akan menjadi panduan dalam segala kegiatan yang akan dilakukan. Seperti penjelasan dari Halim dan Kusufi (2012), bahwa “ suatu organisasi publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan merupakan partisipasi dari setiap tingkat tanggung jawab yang ada.

Hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah dapat diperkuat dengan variabel lain. Variabel yang memperkuat hubungan tersebut adalah variabel moderasi. Beberapa variabel yang diduga dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah antara lain,

motivasi, *Job Relevant Information (JRI)*, desentralisasi, komitmen organisasi dan budaya organisasi (Nazaruddin dan Setyawan, 2012).

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kinerja suatu organisasi/instansi adalah motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lingkungan organisasi/instansi tersebut. Motivasi menurut Lubis (2010) adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif. Selain motivasi, sebuah informasi juga akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, seperti pendapat dari Nazaruddin dan Setyawan (2012) bahwa *Job Relevant Information* merupakan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Keterlibatan bawahan dalam menyusun anggaran akan memungkinkan untuk memberikan informasi yang diketahui.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
3. Apakah budaya organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
4. Apakah desentralisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja

aparatus pemerintah daerah ?

LANDASAN TEORI

Teori Kontinjensi

Teori kontinjensi merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi, seperti ketidakpastian lingkungan dan ukuran organisasi (Lubis, 2010). Dijelaskan pula oleh faktor kondisional atau ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini misalnya kemungkinan adanya hal-hal yang dapat menyebabkan kinerja aparatus pemerintah menjadi lebih efektif.

Goal Theory

Pengertian *Goal Theory* menurut Locke dkk adalah “Teori untuk memprediksi bahwa tujuan yang kuat akan mengarah pada kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang ringan, meskipun begitu kemungkinan mencapai tujuan yang lebih ringan akan tercapai sepenuhnya” (Locke dkk, 1981 : 128).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran dikemukakan dalam *goal theory* bahwa –tujuan yang telah ditetapkan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang luar biasa (Robbins, 2002 : 63). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri-ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparatus pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparatus pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah.

Kinerja Aparatus Pemerintah Daerah

Arti kinerja menurut Fahmi, Irham (2011:2) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode

waktu. Lebih jauh menurut Bastian, Indra (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik yang menunjukkan seberapa besar kinerja manjerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja pegawai.

Komitmen Organisasi

Sopiah (2008:157) mendefinisikan komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya :

kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

Budaya Organisasi

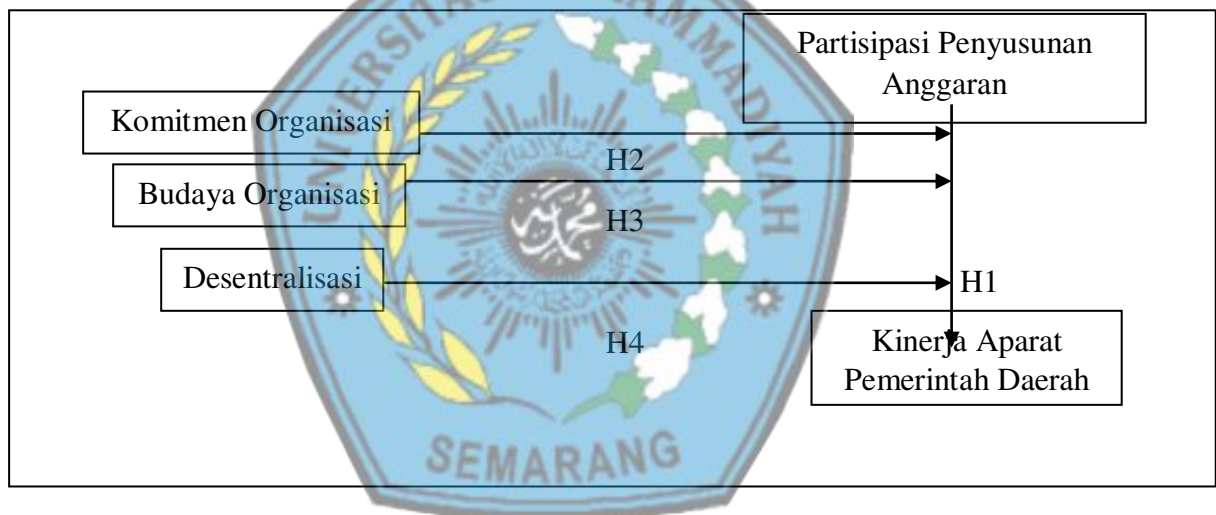
Pengertian budaya organisasi adalah perbedaan sifat, perilaku dan karakteristik yang dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya (Tahir, 2014:120). Lain halnya dengan pendapat Robbins bahwa budaya organisasi merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi (2002:279).

Desentralisasi

Menurut Robbins (2002) desentralisasi adalah banyaknya bawahan yang memberikan masukan atau diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Organisasi yang terdesentralisasi, upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih

cepat, lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka (Robbins, 2002:224).

Kerangka Berfikir



H1 : “Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.”

H2: “Komitmen Organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.”

H3: “Budaya organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.”

H4 :“Desentralisasi memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.”

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja aparat pemerintah daerah (Y).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran. Variabel partisipasi penyusunan anggaran ini dinyatakan dengan lambang (X1).

Variabel Moderasi

Variabel Moderasi, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel moderasi adalah komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Pihak-pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bag, Kepala Balai, dan Kepala UPT. Jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 35.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung yang secara khusus dikumpulkan dengan menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 146-147). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode dalam mengumpulkan data ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya

(Sandjaja dan Heriyanto, 2006:78). Jawaban atas kuesioner diukur menggunakan skala likert dengan skala 1-5, yang mana nilai jawaban dari responden masing-masing memiliki skor yang dapat dihitung. Jawaban yang diberikan yakni berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berikut disajikan objek penelitian dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang dikirim	47
Kuesioner yang direspon	35
Kuesioner yang tidak direspon	12
Presentase pengembalian	78%
Presentase pengembalian yang digunakan	74%

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas setiap

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, pengujian kualitas data, kedua melakukan pengujian asumsi klasik. Tahap ketiga, analisis regresi sederhana dan berganda. Tahap kelima yaitu melakukan pengujian hipotesis.

variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Partisipasi Penyusunan Anggaran.

Correlations

	TOTAL
PPA1 Sig. (2-tailed)	.000
PPA2 Sig. (2-tailed)	.000
PPA3 Sig. (2-tailed)	.000
PPA4 Sig. (2-tailed)	.000
PPA5 Sig. (2-tailed)	.000

Sumber : Data Primer Diolah
 Tahun 2018

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas
 Komitmen Organisasi

Correlations

	TOTAL
KO1 Sig. (2-tailed)	.000
KO2 Sig. (2-tailed)	.000
KO3 Sig. (2-tailed)	.000
KO4 Sig. (2-tailed)	.000
KO5 Sig. (2-tailed)	.000
KO6 Sig. (2-tailed)	.002
KO7 Sig. (2-tailed)	.001
KO8 Sig. (2-tailed)	.007
KO9 Sig. (2-tailed)	.004

Sumber : Data Primer
 Diolah Tahun 2018

Tabel 4.6. Hasil Uji
 Validitas Desentralisasi

Correlations

	TOTAL
D1 Sig. (2-tailed)	.000
D2 Sig. (2-tailed)	.000
D3 Sig. (2-tailed)	.000
D4 Sig. (2-tailed)	.000
D5 Sig. (2-tailed)	.000
D6 Sig. (2-tailed)	.037
D7 Sig. (2-tailed)	.013
D8 Sig. (2-tailed)	.047

Sumber : Data Primer
 Diolah Tahun 2018

Tabel 4.7. Hasil Uji
 Validitas Budaya Organisasi
 dan Kinerja Aparat
 Pemerintah Daerah



	TOTAL
BO1	.035
BO2	.000
BO3	.005
BO4	.012
BO5	.000
BO6	.002
BO7	.000
BO8	.000
BO9	.005
BO10	.048
BO11	.009
BO12	.000
BO13	.001
BO14	.023
BO15	.000

Correlations

		TOTAL
K1	Sig. (2-tailed)	.000
K2	Sig. (2-tailed)	.000
K3	Sig. (2-tailed)	.000
K4	Sig. (2-tailed)	.000
K5	Sig. (2-tailed)	.000
K6	Sig. (2-tailed)	.000
K7	Sig. (2-tailed)	.000
K8	Sig. (2-tailed)	.000
K9	Sig. (2-tailed)	.000

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi untuk semua item pertanyaan adalah kurang dari 0,05. Hal ini brarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil

pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dalam pengukuran variabel-variabel menggunakan indikator *cronbach alpha* (α), jika koefisien $\alpha > 0,60$ maka variabel dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas setiap variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Cut Off	Kesimpulan
Partisipasi penyusunan anggaran	0,755	0,60	Reliabel
Komitmen organisasi	0,748	0,60	Reliabel
Budaya organisasi	0,787	0,60	Reliabel

Desentralisasi	0,880	0,60	Reliabel
Kinerja aparat pemerintah daerah	0,878	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 0,755. Angka ini menunjukkan bahwa setiap konstruk pertanyaan yang disusun untuk mengukur tingkat partisipasi penyusunan anggaran adalah reliable karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60. Nilai cronbach alpha untuk keempat variable secara berturut-turut adalah 0,748 ; 0,787; 0,880; 0,878. Angka ini juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,60, maka variabel komitmen organisasi, budaya organisasi, desentralisasi, dan kinerja aparat

pemerintah daerah dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

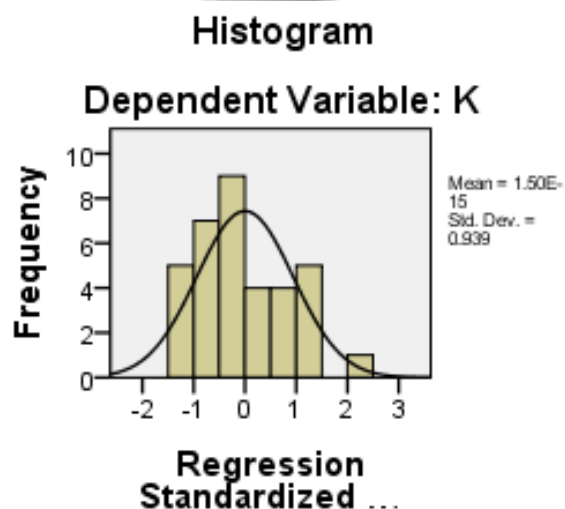
Uji Normalitas

Menurut Kurniawan (2014) uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov one sample test*.

Gambar 4.1

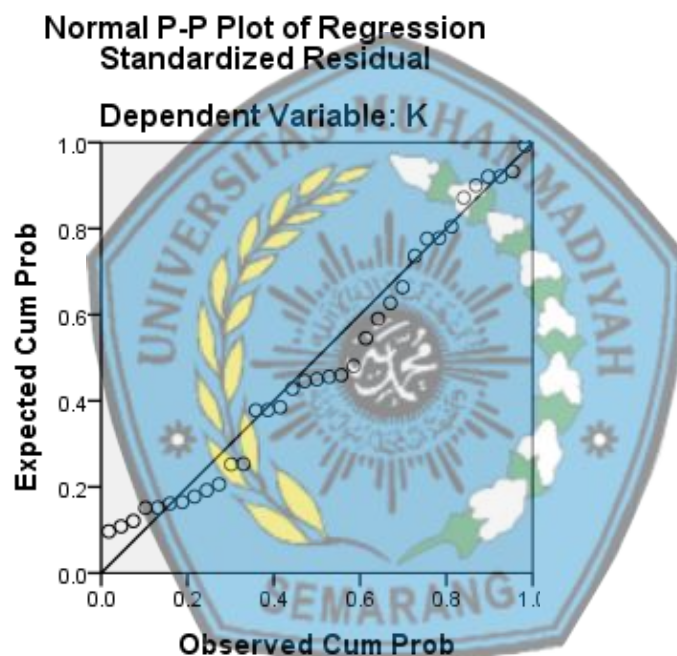
Analisis

Plot



Tabel 4.2

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



Berdasarkan gambar 4.2. grafik normal P-Plot juga menunjukkan bahwa titik-titik persebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonalnya, artinya data sudah terdistribusi normal. Cara selanjutnya untuk menentukan data terdistribusi normal yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar

pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai asymp sig (2-tailed), jika nilai asymp sig nya diatas 0,05 maka data terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Keputusan data dikatakan tidak mempunyai gejala autokorelasi yaitu

jika nilai Durbin Watson (DW) diantara dU sampai dengan 4-dU.

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.561 ^a	.315	.224	3.863	1.228

a. Predictors: (Constant), D, PPA, KO, BO

b. Dependent Variable: K

Uji Multikolinearitas

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Nilai dU dapat ditentukan dengan melihat tabel DW, dimana, jika bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda. Nilai dU dapat ditentukan dengan melihat tabel DW, dimana, jika bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda. Nilai dL = 1,222 dan hasil 4-dL = 4 - 1,222 = 2,778. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.11. yang menunjukkan nilai DW sebesar 1,228, yang artinya nilai tersebut terletak diantara 1,222 sampai 2,778, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PPA	.994	1.006
	KO	.926	1.080
	BO	.534	1.872
	D	.551	1.816

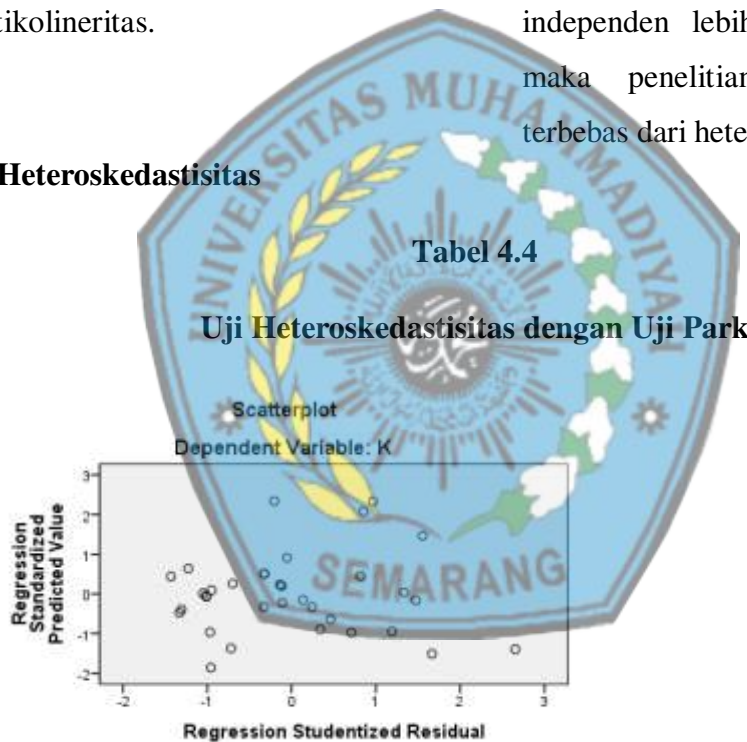
a. Dependent Variable: K

Sumber data SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa kelima variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki $VIF > 10$. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain. Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi setiap variabel independen lebih lesar dari 0,005 maka penelitian tersebut sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.3. dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar tidak membentuk pola tertentu, maka dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.938	5.870		1.863	.072
1 PPA	-.148	.155	-.159	-.953	.348
KO	-.165	.088	-.326	-1.883	.069
BO	-.046	.094	-.110	-.483	.632
D	.106	.081	.296	1.316	.198

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Nilai sig dari uji Glejers dapat dilihat pada tabel 4.12., dimana nilai sig setiap variable menunjukkan diatas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi dan Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghazali (2011) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	.224	3.863

a. Predictors: (Constant), D, PPA, KO, BO

Sumber :Data Primer diolah tahun 2018.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square dan adjusted R Square adalah 0,315 dan 0,224. Artinya variabel kinerja aparat pemerintah daerah dapat dijelaskan sebanyak 22,4% oleh variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi). Sisa sebesar 77,6%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 (H₁) menyatakan bahwa “ Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah” menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman analisis regresi

sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15. Hasil Uji Hipotesis 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.529	5.747		2.702	.011
	PPA	1.034	.289	.528	3.574	.001

a. Dependent Variable: K

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 4.15. dapat diketahui bahwa nilai signifikansi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan nilai t hitung $3,574 > 1,690$. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Uji Regresi Linier Berganda (Uji Hipotesis 2)

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji H₂ sampai H₄. Pengujian hipotesis 2 (H₂) menyatakan bahwa “Komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16. Hasil Uji Hipotesis 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	198.818	64.781		3.069	.004
	PPA	-8.516	3.257	-4.351	-2.615	.014
	KO	-5.696	2.007	-5.326	-2.839	.008
	PPA.KO	.297	.101	7.253	2.945	.006

a. Dependent Variable: K

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah dibawah 0,05 yaitu 0,006. Nilai t hitung $2,945 > t$ tabel 1,690.

Uji Regresi Linier Berganda (Uji Hipotesis 3)

Pengujian hipotesis 3 (H₃) menyatakan bahwa “ Budaya

organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil Uji Hipotesis 3

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.					
	B	Std. Error	Beta							
1	(Constant)	-97.509	171.800							
	PPA	6.661	8.633	3.403	.772	.446				
	BO	1.679	2.550	1.922	.659	.515				
	PPA.BO	-.084	.128	-3.509	-.652	.519				

a. Dependent Variable: K

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,519. Nilai t hitung $-0,652 < t$ tabel 1,690. Berdasarkan hal tersebut maka H₃ ditolak yang menyatakan bahwa budaya organisasi (VM₂) memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arifin (2012)

yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Uji Regresi Linier Berganda (Uji Hipotesis 4)

Pengujian hipotesis 4 (H₄) menyatakan bahwa “ Desentralisasi memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18. Hasil Uji Hipotesis 4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	52.628	45.542		1.156	.257
1	PPA	-.930	2.355	-.475	-.395	.695
	D	-1.229	1.498	-1.620	-.821	.418
	PPA.D	.065	.078	1.929	.841	.407

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018.

Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,407. Nilai t hitung 0,841 < t tabel 1,690. Berdasarkan hal tersebut maka H4 ditolak yang menyatakan bahwa desentralisasi (VM₃) memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nazaruddin dan Setyawan (2012) yang menyatakan bahwa desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “ Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan

Komitmen Orgasasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi” adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Budaya organisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
4. Desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data penelitian untuk variabel kinerja aparat pemerintah daerah jika diukur dengan kuesioner akan menghasilkan data yang subjektif, sedangkan jika diukur dengan data sekunder tidak bisa mencerminkan kinerja dari aparat pemerintah daerah.



2. Waktu yang sulit untuk bertemu dengan responden yang mempunyai kesibukan dinas luar kota membuat jangka waktu pengisian kuesioner lebih lama dari yang ditargetkan oleh penulis.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam bidang anggaran sektor publik.

5.3. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinperindag, untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah hendaknya mengikutsertakan pegawai dan menguatkan komitmen pegawai pada organisasi, terutama dalam proses penyusunan anggaran.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya mampu mencari alat ukur yang tepat untuk menilai kinerja aparat pemerintah daerah, karena jika alat ukurnya berupa pertanyaan dalam kuesioner dikhawatirkan akan menilai secara subyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, Asman. 2016. *Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. PAN RB.
- Adrianto, Yogi. 2008. *Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Semarang)*. Tesis.
- Agusti, Restu. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal Ekonomi. Volume 20, No. 3. September 2012.

- Anthony dan Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat
- Arifin, Sholikhun dan Rohman, Abdur. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 1, No 2. 2012.
- Fahmi, Irham.2011. *“Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi”*. Cetakan ke-2. Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gordon, L.A., dan V.K. Narayanan. *Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty and Organization Structure : An Empirical Investigation*. Accounting, Organizational and Society. Volume 9, No 1, pp.33-47. 1984
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hansen dan Mowen. 2000. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Hofstede, Geert. 1997. *Culture's and Organization*. New York : Washington D.C. London, Me Crow –Hill.
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan kedua. Yogyakarta : BFFE UGM.
- Ikhsan, A., dan Ishak, M. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Istanti, Sri Layla Wahyu. 2013. *Teori Kontingensi, Sistem Pengendalian Manajemen dan Keluaran Perusahaan : Hasil yang Lalu dan Arah Masa Depan*. Potensio. Volume 18, No 2. Januari 2013.
- Karim, Abdul. 2018. *Analisa Data dengan SPSS*. Semarang.
- Lestari, Riza. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dengan Gaya Kepemimpinan, Desentralisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. JOM FEKON. Volume 1. No 1. Oktober 2014.
- Locke, dkk. 1981. *Goal Setting and Task Performance : 1969-1980*. Volume 90. No 1.

- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahoney. Et. Al. 1963. *Development of Managerial Performance: A Resarch Approach*. Cincinnati : South Western Publishing.
- Mangkunegara, A.P. 2005. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperoleh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel, Tahun 1, No 4, Juni.2002.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Andi.
- Milani, K. 1975. "The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes". A Field Study. *Jurnal Akuntansi*, 50 (2): 74-284.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., dan Porter, L. W. (1979). *The Measurement of Organizational Commitment*. *Journal Keperilakuan*, 14, 224–247.
- Nazaruddin, Ietje dan Setyawan, Henry. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Volume 12. No 2. Juli 2012.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta : Interpena.
- Perdana, Putra Prima. 2017. *Tingkat Akuntabilitas Pemda Masih Rendah*. Kompas. 25 Januari. 2017. Halaman 2.
- Permana, Dhimas Angga. 2017. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, No. 5 Mei.
- Prasetyo, Andry Wahyu. 2016. *Penggunaan Laba, Arus Kas, dan Profitabilitas untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress suatu Perusahaan*.
- Prawirosentono.S, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPF, Yogyakarta.
- Recardo, R. and Jolly, J. 1997. *Organizational Culture and Teams*. *SAM Advanced Management Journal*, 62, 4-7.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*

- tentang *Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Recardo, Ronald dan Jolly Jennifer. 1997. *Corporate Culture and Team*.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Indonesia : PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Robbins, S.P. dan Judge, T.A. 2008. *Organizational Behavior*. Edisi Ke-15. Jakarta:Salemba Empat.
- Rondinelli, D., and Nellis, J., "Assessing Decentralization Policies: A Case for Cautious Optimism", *Development Policy Review* IV, 1 (1986).
- Rumidi, Sukandar. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sandjaja, B. dan Albertus Heriyanto. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sakti, Krisna Murti Darpita. 2017. *Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajrial dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saraswati, Gita Pramudya. (2015). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, Luh Putu Dian Metta dkk. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2, No. 1. 2014.
- Sarjito, Bambang dan Osmed Munthaher. 2007. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi"
- Subramaniam, N. and NM. Ashkanasy. (2001). The Effect of Organizational Culture Perceptions on the Relationship Between Bugetary Participation and Managerial Job-Related Outcomes. *Australian Journal of Management*. 26(1). 2-20.

- Suryani, Dewi. 2016. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budgetary Slack, Pelimpahan Wewenang, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD*. Tesis. *Relevant Information sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Schuler, S.R., dan Susan E Jackson. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21*. Jilid 2. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Silmilian. 2013. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Dengan Motivasi Kerja dan Internal Locus of Control sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang)*. Symposium Nasional Akuntansi VII, Solo, 15-16 September.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Edisi 1. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tahir, Arifin. 2014. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Edisi 1, cetakan ke-1. Yogyakarta : Deepublish.
- UNDP. 1997. *United Nations Development Programme : Indonesia*.
- Wulandari, Isworo. 2017. *Komitmen Organisasi dan Job*